

ANTISIPASI PENURUNAN ANGGARAN SEKTOR UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

Dr Riant Nugroho, Ketua Umum MAKPI

Diterima: 27 Juli 2021; direviu: 28 Juli 2021; dipublikasikan: 28 Juli 2021

Abstrak:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, MSPE, Ph.D, mengumumkan perubahan alokasi APBN untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yang naik sekitar dari Rp 45 triliun dari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun; namun disampaikan bahwa alokasi dukungan untuk sektor UMKM dan korporasi turun dari Rp171,77 Triliun menjadi Rp161,20 Triliun. Pada hal di tahun 2018 UMKM merupakan 99,99% (64,2 juta) dari total populasi pelaku bisnis nasional, mempekerjakan 116 juta orang (97% dari total pekerja), dan memberikan kontribusi 57,3% kepada PDB. Mengingat (1) keterbatasan anggaran Pemerintah (2) kebutuhan untuk anggaran kesehatan (3) ketidakjelasan efektivitas kebijakan penyelamatan UMKM dengan alokasi anggaran sebelumnya, maka Pemerintah direkomendasikan mengambil pilihan kebijakan yang telah ditetapkan (*status quo*) dengan melakukan komunikasi dengan pakar terkait dalam sampel yang memadai; mengkomunikasikan dengan pelaku utama UMKM dan pemangku kepentingan utamanya; dan dilakukan kurang dari 1 (satu) minggu.

Kata Kunci: Anggaran; UMKM; Pandemi; Covid-19

A. ISU KEBIJAKAN

Sabtu, 17 Juli 2021, Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, MSPE, Ph.D, mengumumkan perubahan alokasi APBN untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yang naik sekitar dari Rp 45 triliun dari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun. Namun demikian, disampaikan bahwa alokasi dukungan untuk sektor UMKM dan korporasi turun dari Rp171,77 triliun menjadi Rp161,20 Triliun. Setiap krisis, sektor UMKM senantiasa menjadi sektor penjaga ketahanan ekonomi masyarakat, misalnya pada tahun 1998-2000, bahkan dengan dukungan keuangan Pemerintah yang terbatas.

Menteri Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya pada Opening Ceremony BCA UMKM Fest 2021, Jumat 19 April 2021 mengapresiasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang luar biasa penting di dalam perekonomian Indonesia. Dikemukakan bahwa Pemerintah berupaya menjaga daya tahan UMKM dan mendorong melalui berbagai instrumen fiskal agar UMKM dapat bangkit kembali se usai pandemi Covid-19 karena jika UMKM sudah menunjukkan geliat aktivitasnya, maka ekonomi nasional pun akan bangkit. Pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) memberikan alokasi anggaran kepada UMKM dan korporasi hingga Rp 184,83 triliun. Selain itu, masih ada pemberian insentif usaha dalam bentuk berbagai kemudahan dan pengurangan beban perpajakan yang mencapai Rp 58,46 triliun. Berbagai dukungan yang diberikan kepada UMKM tersebut juga berkolaborasi dengan perbankan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di akun Instagramnya @airlangahartarto_official, Senin (15/3/2021) menyampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari sektor UMKM, terlebih di tengah pandemi Covid-19 banyak UMKM yang berjatuh. "Pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi harus dimulai dari sektor UMKM, sebab sektor ini berkontribusi 61% bagi PDB Indonesia. Jumlah UMKM terdampak pandemi sebanyak 64,2 juta atau 99% dari seluruh usaha yang beroperasi di seluruh Indonesia," demikian dikatakannya.

Pada tahun 2018 UMKM merupakan 99,99% (64,2 juta) dari total populasi pelaku bisnis nasional, mempekerjakan 116 juta orang (97% dari total pekerja), dan memberikan kontribusi 57,3% kepada PDB. Pernyataan kebijakan dari Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk

mendukung UMKM di tengah pandemi covid yang diwujudkan dalam penurunan alokasi APBN untuk UMKM sebesar Rp 10 Trilyun menjadi pada saat ini menjadi agenda kebijakan yang penting untuk dijawab, menilai benar atau tepat, dan apa rekomendasi atas kebijakan tersebut.

B. ANALISIS

Anggaran untuk pemilikan ekonomi nasional (PEN) naik dari rencana Rp 699,43 Trilyun menjadi Rp 744,75 Trilyun, detailnya ditunjukkan di Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Perubahan Jumlah dan Alokasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Uraian	5 Juli 2021 (Triliun)	16 Juli 2021 (Triliun)
	Sidang Kabinet	Update
Kesehatan	199,93	214,95
Perlindungan Sosial	153,86	187,84
Program Prioritas	117,04	117,94
Insentif Usaha	62,83	62,83
Dukungan UMKM dan Korporasi	171,77	161,20
Jumlah keseluruhan	699,43	744,75

Sumber: Keterangan Menteri Keuangan, 17 Juli 2021

Laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM Juni 2022, berdasarkan laporan dari dinas di provinsi, kabupaten dan kota per tanggal 20 Juni 2020. mencatat ada sebanyak 67.051 pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19 di Indonesia. Penyebab utamanya adalah efek dari kebijakan dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yaitu penjualan menurun, sulitnya bahan baku, distribusi terhambat, permodalan dan produksi terhambat, seperti ditunjukkan di Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Penurunan Alokasi Anggaran per Sektor di Pertengahan Tahun 2020

No	Sektor	Penurunan Juni/Jul 2020*
1	Penyediaan akomodasi makan dan minuman	35,88%
2	Perdagangan besar dan eceran	25,33%
3	Industri pengolahan	17,83%
4	Aktivitas jasa	11,69%
5	Usaha pertanian, kehutanan dan perikanan	5,6%,

Sumber: Kemenkop & UKM 15/7/2020

Belum ada data penurunan usaha UMKM setelah PPKM darurat dilaksanakan. Namun, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menilai dengan perpanjangan PPKM Darurat, penurunan Omzet UMKM akan bisa mencapai 70 hingga 80 persen (Kompas Rabu (21/7/2021)¹. Wakil Ketua Kadin Divisi UMKM Jawa Barat Helma Agustiawan melaporkan bahwa para hingga akhir Juli 2021 penurunan usaha mencapai 70%, khususnya fashion, termasuk penjualan

¹ <https://money.kompas.com/read/2021/07/21/103551026/omzet-umkm-diprediksi-anjlok-80-persen-akibat-perpanjangan-ppkm-darurat>

online². Pada 19 Maret 2021, Bank Indonesia melaporkan temuannya, bahwa sebanyak 87,5% responden UMKM mengaku terdampak pandemi Covid-19, 93,2% di antaranya terdampak merosotnya penjualan yang berdampak pada merosotnya pendapatan, laba, dan arus kas.

Tidak dijelaskan oleh Pemerintah, penurunan alokasi anggaran untuk membantu UMKM, sehingga dapat bermuara kepada ketidakpercayaan publik kepada kebijakan Pemerintah. Karena itu, direkomendasikan tiga pilihan kebijakan seperti ditunjukkan di Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Rekomendasi Pilihan Kebijakan

I. Status quo	II. Perubahan kecil	III. Perubahan besar
Jumlah alokasi tidak diubah	Menambah alokasi Rp 5 Trilyun	Menambah alokasi lebih dari Rp 10 Trilyun
Pemerintah melakukan kajian cepat untuk menjelaskan sesuai data	Memberikan pembenaran atas penambahan yang terbatas	Menjelaskan kepedulian Pemerintah
Pemerintah mengubah strategi penguatan UMKM dari berbasis bantuan keuangan ke bantuan manajemen dan kemitraan	Tetap mempertahankan strategi dukungan keuangan, dan memikirkan strategi pelengkap	Mempromosikan strategi dukungan keuangan kepada UMKM
Membentuk “gugus tugas” UMKM yang terdiri dari pakar lintas ilmu	Memperkuat Tim UMKM di Kemenkop UMKM	Tidak ada perubahan tim pengembangan UMKM
Menyiapkan kebijakan khusus penyelamatan UMKM	Tidak ada aksi	Tidak ada aksi

C. SIMPULAN

Mengingat (1) keterbatasan anggaran Pemerintah (2) kebutuhan untuk anggaran kesehatan (3) ketidakjelasan efektivitas kebijakan penyelamatan UMKM dengan alokasi anggaran sebelumnya, maka Pemerintah direkomendasikan mengambil pilihan kebijakan yang pertama. Adapaun langkah aksinya adalah:

1. Menetapkan pilihan kebijakan pertama;
2. Melakukan komunikasi dengan pakar terkait dalam sampel yang memadai;
3. Melakukan komunikasi dengan pelaku utama UMKM dan pemangku kepentingan utamanya; dan
4. Langkah aksi dilakukan kurang dari 1 (satu) minggu.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi respon publik dalam waktu-waktu mendatang.

² <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1012174842/omzet-anjlok-hingga-70-persen-umkm-dampak-ppkm-darurat-lebih-berat-dari-psbb-2020>